RENCANA KERJA PERUBAHAN

INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BEKASI

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Kota Bekasi dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Bekasi.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bekasi. Dengan demikian rencana kerja perubahan Inspektorat Kota Bekasi merupakan turunan dan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kota Bekasi dan Renstra Inspektorat Kota Bekasi.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Inspektorat Kota Bekasi tahun 2025 dengan baik, namun demikian sebagaimana kata pepatah "tidak ada yang sempurna", maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Inspektorat dan Pemerintah Kota Bekasi.

Bekasi, 20 Agustus 2025 Inspektur Kota Bekasi

INSPEKTOR DAERAH

KA

lis Wisynuwati, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE, QGIA

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	3
1.4 Dasar Hukum	5
1.5 Sistematika Penyususunan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA IINSPEKTOR	AT
TRIWULAN II TAHUN 2025	8
2.1 Evaluasi Kinerja sasaran	8
2.2 Evaluasi Kinerja Program dan kegiatan	13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,	
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025	34
3.1 Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi	34
3.2 Tujuan	35
3.3 Sasaran	32
BAB IV. PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025	9
Tabel 2.2 Program, Sasaran, Indikator Target dan Realisasi Tahun 2025	9
Tabel 2.3 Anggaran dan Capaian realiasasi Keuangan dan Fisik S.d Juni 2025	13
Tabel 2.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025 (TW.II SMT.1)	20
Tabel 2.5 Evaluasi Hasil Terhadap RENJA Triwulan II	27
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025	36
Tabel 3.2 Program, Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi 2025	36
Tabel 3.3 Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam pelaksanaannya, dinamika kebijakan, kondisi keuangan daerah, hasil evaluasi kinerja, serta perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat seringkali menuntut adanya penyesuaian terhadap rencana awal yang telah disusun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renja yang sudah ditetapkan. Hanya saja dalam perkembangannya diperlukan penyesuaian dengan aturan yang berlaku saat ini dan juga kondisi terkini dari Pemerintahan Kota Bekasi, salah satunya adalah penyesuaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih optimal, sejalan serta berkesinambungan.

Renja-PD perubahan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun 2025 yang merupakan tahun awal dari pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Proses penyusunan Renja perubahan didasarkan pada hasil evaluasi kinerja selama 6 (enam) bulan pertama atau semester kesatu tahun berjalan, kemudian dilihat efektivitas pencapaiannya serat kemungkinan dapat dikerjakan sampai dengan akhir tahun anggaran.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil (APIP) Inspektorat Kota Bekasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Pemerintah Daerah (RPD), serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan anggaran dalam tahun berjalan diperlukan penyesuaian keadaan yaitu :

- Penyesuaian Anggaran Kegiatan yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Efisiensi Belanja dalamPelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Mendagri No. 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Penyesuaian program dan kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi periode 2025-2029 yakni Visi "Kota Bekasi semakin Nyaman dan Sejahtera".

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2025
 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja pada OPD
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan

- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
- e. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang lebih profesional
- f. Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam menjamin efektifitas sistem pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan.
- g. Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan kebijakan pengawasan internal.
- h. Mengefektikan pengggunaan anggaran yang disediakan untuk pencapaian kinerja pengasawan Inspektorat.
- i. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,RPJP dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW. II) perlu dilakukan penyesuian agar hasil kerja maksimal sesuai target yang telah ditetapkan. Pertimbangan lain yaitu :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- 2. Percepatan target kinerja dan indikator kinerja program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.

 Penyesuaian kinerja berdasarkan visi, misi, sasaran dan tujuan Pemerintahan Kota Bekasi setelah adanya Wali Kota dan Wakil Walikota yang baru hasil pemilu 2024 dan disahkan dalam pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025.

Sebagai Perangkat Daerah Kota Bekasi, Inspektorat mengusung visi Kepala Daerah yang kelima yakni : Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren, dengan tujuan: Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif dan sasaran kelima yakni ; Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota.

Inspektorat Daerah Kota Bekasi mengambil sasaran Kota sebagai tujuan Perangkat Daerah sesuai bidang yang dikerjakan yakni : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota bidang pengawasan dengan dua indikator sasaran yakni Pertama Level Kapabilitas APIP dan kedua: Nilai Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Pada gerakan Kota Bekasi Berkinerja atau dikenal dengan sebutan "Kobe Berkinerja" Inspektorat Kota Bekasi mengusung peningkatan tata kelola Pemerintahan Kota dan penguatan Manajemen Pendukung, dengan sasaran prioritas terlaksananya agenda reformasi Birokrasi untuk mendukung Kinerja Pemerintah Kota Bekasi dalam pelayanan publik dan terciptanya Pemerintahan Kota yang Baik dan bersih (Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pada konteks ini rencana kerja perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang baru. Perubahan tidak dilakukan pada progra kegiatan dan sub kegiatan, perubahan dilakukan pada sasaran dan beberapa bagian pada indikator dan penganggaran.

Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran maka Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Inspektorat Tahun 2025 serta menjadi dasar Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

1.4 **DASAR HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
- 10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 82 Seri D);
- 11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
- 12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
- 13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 82 Seri D);
- 14. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/Kep.509-Bappelitbangda/IX/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 tanggal 4 September 2025.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI

BAB I PENDAHULUAN, memuat:

- 1.1 Maksud dan Tujuan
- 1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada *tabel 2.4.*

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah *tabel 3.1*

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI TRIWULAN II TAHUN 2025

1.1. Evaluasi Kinerja Sasaran

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2025. Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 53.138.727.990,-

Adanya perubahan tata kelola pemerintahan Kota Bekasi yang semula pemerintahan transisi (sebelum pemilu kepala Daerah) dengan RPD sebagai dasar pelaksnaan kegiatan, kemudain terpilihnya kepala Daerah yang baru dengan visi, misi yang diusungnya, mengharuskan tata kelola pemerintahan dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang baru. Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada RPJMD dan RKPD yang disusun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tiga program yaitu:

- 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2). Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- 3). Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Pencapaian Kinerja Inspektorat tahun 2025 dilakuan dengan menyelaraskan kinerja pemerintah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 dengan tujuan Inspektorat adalah meningkatnya Akuntabilitas Kota bidang Pengawasan dengan sasaran meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern dan meningkatkan efektivitas pencegahan Korupsi, indikator atas kedua sasaran tersebut adalah Level Kapabilitas APIP dan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi (IEPK). Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

(Renja 2025 Sesuai RPD)

TUJUAN	SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KETRANGAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Inspektorat	84,57	0	Belum Dilakukan penilaian

Sumber: RPD tahun 2024-2026

Tabel 2.2

Program, Sasaran, Indikator, Target , Realisasi 2025

(Renja 2025 Sesuai RPD)

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektora t	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	80	78,66	TW.1
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	91	87.33	
		Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	100		Belum penilaian

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Keterangan
Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	36,7	-	Belum penilaian
		Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas	100	-	Belum ada penilaian
		Level Kapabilitas APIP	3	3	Belum ada penilaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%		Belum ada penilaian
Daerah Kabupaten/Kota		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		Belum ada penilaian
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		Belum ada penilaian
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		Belum ada penilaian
		Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		Belum ada penilaian

Tabel 2.3. Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025

(Renja 2025 Sesuai RPJMD)

TUJUAN	SASARAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	KETRANGAN
Meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota bidang Pengawasan	Nilai SPIP Teritegrasi Kota Bekasi Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Intern	2.8		
	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	2.9		

Sumber: RPJMD Kota Bekasi tahun 2025 - 2029

Tabel 2.4
Program, Sasaran, Indikator, Target , Realisasi 2025

(Renja 2025 Sesuai RPJMD)

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektora t	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap aturan dan perundangn - undangan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal N-1	74,50	63,87	Dalam proses tindak lanjut
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Ekternal N-1	86.55	66,67	Dalam proses tindak lanjut

Program	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun	Realisasi tahun 2025	Keterangan
Inspektorat	Program Inspektorat	Program Inspektorat	2025	tanun 2020	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko	2.8	-	Belum penilaian
		Nilai MCSP KPK	90,50	-	Belum ada penilaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100	100	
·		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95	67,34	
		IP ASN	86,8	87,77	
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100		Belum ada penilaian

1.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan

Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran,tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan alokasi kegiatan dan anggaran yang disediakan. Kaluapun ada kekurangan itu karena adanya perubahan anggaran yang harus diefisiensi sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Adapun evaluasi sampai dengan TW II (semseter) Tahun 2025 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Capaian Realisasi Keuangan & Fisik
Inspektorat s.d bulan Juni 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik	Ket.
	Program/Kegiatan/		Keuangan			
	Sub Kegiatan					
1.	INSPEKTORAT DAERAH					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	38.741.183.000	18.759.254.125	48.68	52.09	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.0000	0	0	46.15	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	0	0	46.15	

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik	Ket.
	Program/Kegiatan/ Sub		Keuangan			
	Kegiatan					
A.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.087.063.450	17.575.178.151	54.44	54.544	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	32.273.532.000	17.575.178.151	54.44	54.44	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	0	0	0	
A.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	369.000.000	197.200.000	22.28	18.36	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135.000.000	0	0	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	750.000.000	197.200.000	26.29	21.67	
A.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.558.222.440	675.402.598	26.40	55.78	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	380.090.480	157.319.000	41.39	70.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	358.749.000	197.227.600	54.98	70.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	12.051.000	26.78	41.65	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	240.000.000	25.400.000	10.58	50.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.534.382.960	283.404.998	18.47	50.00	
A.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.515.000.000	533.482.000	3.84	20.51	
	Pengadaan Mebel	405.000.000	0	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.110.000.000	58.249.000	5.25	28.000	
4. 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.528.560	178.321.583	37.26	46.52	

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik	Ket.
	Program/Kegiatan/ Sub		Keuangan			
	Kegiatan					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	0	0	50.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000	0	0	16.66	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	424.528.560	178.321.583	42.00	50.00	
A.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	799.900.000	74.902.793	9.36	45.95	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	43.763.993	17.51	42.86	
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.900.000	6.138.800	1.75	48.78	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	25.000.000	12.50	44.87	
В	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	1.450.986.000	122.990.000	8.48	23.57	
B.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	955.738.000	106.790.000	11.17	21.87	
1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85.590.000	0	0	0	
1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	290.148.000	0	0	0	
1.3	Reviu Laporan Kinerja	30.000.000	13.500.000	45.00	45.00	
1.4	Reviu Laporan Keuangan	200.000.000	93.290.000	46.65	100	
	Kerja Sama Pengawasan Internal	300.000.000	0	0	0	
1.5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	50.000.000	0	0	0	
B.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	495.248.000	16.200.000	3.27	26.85	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	162.800.000	0	0	0	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	332.448.000	16.200.000	4.87	40.00	

C.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.775.650.000	20.400.000	1.15	26.03	
C.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	848.720.000	20.400.000	2.40	10.00	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	248.720.000	20.400.000	8.20	10.00	
1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	600.000.000	0	0	10.00	
C.2	Pendampingan dan Asistensi	926.930.000	0	0	40.71	
2.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	154.370.000	0	0	10.00	
2.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	723.800.000	0	O	50.00	
2.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	48.760.000	0	0	0	
	Total	53.138.727.990	22.920.924.034	43.13%	47.89%	

Sumber: Simpelbang Juni 2025

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang diselaraskan dengan penyediaan anggaran terlihat dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2025) mengalami keterlambatan penyerapan anggaran khsususnya pada kegiatan belanja langsung. Ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk penambahan anggaran untuk memfasilitasi pengangkatan pada jabatan fungsional auditor dan PPUD.
- 2. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Penedidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 3. Penyediaan Barang bahan Logistik Kantor sub kegiatan belanj alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover, belanja naturan dan pakan natura
- 4. Penambahan anggaran pada belanja perjalanan dinas biasa dan perjalan dinas dalam kota kegiatan penyekenggaraan raat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5. Pengurangan pada sub kegiatan belanja mebel
- 6. Penambahan pada kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya; sub

- kegiatan belanja modal alat rumah tangga dan belanja komputer
- 7. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN dan iuran jaminan kecelakaan kerja non ASN
- 8. Pengurangan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangandaan
- 9. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor berpenumpang
- 10. Honor Nara sumber atau embahas, moderator, pembawa acara
- 11. Belanja jasa konsultasi berprientasi telamtika
- 12. Perubahan anggaran pada sub kegiatan kordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja Triwulan II) keseluruhan anggaran murni Inspektorat Kota Bekasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 53.138.727.990.,- Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 3 bahwa capain fisik sebesar 43.89% dari target fisik 46.92% sampai dengan 28 Juni 2024, dengan capaian keuangan sebesar 45.26% dari target yang direncanakan sampai dengan akhir bulanJuni 2025 sebesar 58%, terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada setiap bulan sampai dengan bulan Desember 2025.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada laporan sampai dengan Triwulan II Semeseter I tahun 2025 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Inspektorat Tahun 2025 pada *Tabel 2.6.* Dan evaluasi realisai penyerapan anggaran (keuangan dan fisik) dapat dilihat pada *tabel 2.7* sebagai berikut :

Tabel 2.6 EVALUASI CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025 (Triwulan II semester I)

					Program/	Indikator Program/	Target	Target I	Kinerja 2025	Ket
	K	(ode	!		Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir RPJMD	Target	Realisasi	. Ket
		1			2	3	4	7	8	13
6	1	1				Pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota yang optimal				
						Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%		
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%		
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%		
						Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%		
6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%		
6	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan		
6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah		100%		

6	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bula n	60/org	
6	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
6	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
6	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Dalam Proses
6	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	60 Orang	Berlanjut Smt II
6	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
6	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0		Dirasional isasi
6	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2	Berlanjut
6	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2	Belanjut

					Program/	Indikator Program/	Target		dan Kerangka danaan	Ket.
	К	ode			Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir RPJMD	Target	Realisasi	
		1			2	3	4	7	8	13
6	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		0	0	Di rasionalis asi
6	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	6 laporan	Berlanjut
6	1	1	2	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	6 laporan	Berlanjut
6	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		
6	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	0	
6	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	0	Dilaksana kan di smt II
6	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		

					Program/	Indikator Program/	Target	Target Kinerja	2024	Ket.
	K	ode			Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir RPJMD	Target	Realisasi	Ket.
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	0	е
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	0	
6	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	6 laporam	
6	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		
6	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	5 unit	

					Program/	Indikator Program/	Target	Target Kinerja	a 2024	Ket.
	K	ode			Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir RPJMD	Target	Realisasi	Net.
6	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		51 Unit	27 unit	
6	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		156 Unit	75	
6	1	1	2	9	Pemeliharaan/Reh a bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	0	
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN					
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Internal		80%	78,66	
						Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal		91%	87.33	
						Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel		100%		Belum dilakukan penilaian

					Program/	Indikator Program/	Target	Target Kinerja	2024	Perangkat
	K	ode			Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir RPJMD	Target	Realisasi	Daerah
		1			2	3	4	7	8	13
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan		6 Dokumen		
6	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Laporan		
6	1	2	2	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		1 Laporan		
6	1	2	2	З	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		6 Laporan	1 laporan	
6	1	2	2	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1 Laporan	1 laporan	
6	1	2	2	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan		
6	1	2	2	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		1 Dokumen		

					Program/	Indikator Program/	Target	Target Kinerja 2024		Perangkat
	ŀ	(ode			Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir RPJMD	Target	Pagu	Daerah
6	1	2	2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan		2 Dokumen		
6	1	2	2	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 Laporan	1	
6	1	2	2	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		1 Laporan	1	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGA N DAN ASISTENSI					
						Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01		36,5		Proses penilaian oleh BPKP
						Level Kapabilitas APIP		Level 3	3	Proses penilaian oleh BPKP
						Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas		100%		Proses PM oleh ITKO
6	1	3	2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan		2 Produk Kebijakan Pengawasan		
6	1	3	2	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	1	
6	1	3	2	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendasi		
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi		4 Dokumen		
6	1	3	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		6 Perangkat Daerah		
6	1	3	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		44 Perangkat Daerah	44	
6	1	3	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 Kegiatan	1 laporan	
6	1	3	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		44 Perangkat Daerah	44	
то	TAL									



EVALUASI HASIL TERHADAP RENJA PERANGKAT DAERAH PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT KOTA PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2025 TRIWULAN II INSPEKTORAT KOTA

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Per	arget Renstra rangkat Daerah pai dengan tahun	Kir Pera	alisasi Capaian nerja Renstra angkat Daerah	Angg	: Kinerja dan aran Renja t Daerah Tahun		Realis	asi Kine	erja Pada Triwulan	1		Kiner	alisasi Capaian rja dan Anggaran nja Perangkat	Cap Kiner	ngkat paian rja dan Ilisasi	Ang Peran	sasi Kinerja dan garan Renstra gkat Daerah s/d un 2025 (Akhir	Ting Capa Kinerj Reali Angga	ian a dan sasi aran	Unit Perangkat Daerah	Keterangan
	RKPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)		5 (Akhir Periode Renstra PD)	Per	ai dengan Renja angkat Daerah nun Lalu (n-2)		Tahun n-1) yang evaluasi		1		п	Ш	IV		Daerah yang dievaluasi	Ren	garan ija PD i n-1 (%)	Rer	in Pelaksanaan nja Perangkat ah Tahun 2025)	Rens Peran Daera tahun (%	gkat h s/d 2025	Penanggung Jawab	
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11	12	=8+9+10+11	13=12/	7x100%		14=6+12	15=14/5	×100%	16	17
'	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	16	17
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						100 %	53.138.727.990,00	6,51	9.557.456.184,00	21,30	12.821.897.514,00			27,81	22,379,353,698,00	27,81	1 42,11	27,81	22.379.353.698,00				
6.1		INSPEKTORAT DAERAH						100 %	53.138.727.990,00	6,51	9.557.456.184,00	21,30	12.821.897.514,00			27,81	22.379.353.698,00	27,81	1 42,11	27,81	22.379.353.698,00				
6.1.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00 %	2.879.950.000.000,00	100,00 %	36.977.002.356,00	100,00 %	48.474.548.060,00	11,57	9.557.456.184,00	28,46	12.748.949.514,00			40,04	22.306.405.698,00	40,04	4 46,02	40,04	22.306.405.698,00	40,04	0,77		
1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	76.791.000,00	0,00	0,00	57,14	0,00			57,14	0,00	57,14	4 0,00	57,14	0,00	57,14	0,00		
1.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7,00 Laporan	76.791.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00			4,00	0,00	57,14	4 0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	Inspektorat Kota	
			•			•	•								Rata-	rata capaia	n kinerja Kegiatan (%)	57,14	4 0,00	57,14	0,00	57,14	0,00		
		•	1													Pre	edikat kinerja Kegiatan	Rendah							
1.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Paleporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100 %	39.128.506.000,00	62,50	9.338.803.927,00	14,29	11.479.851.296,00			76,79	20.818.655.223,00	76,79	53,21	76,79	20.818.655.223,00	76,79	0,72		
1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					2.968,00 Orang/bulan	39.118.406.000,00	742,00	9.338.803.927,00	848,00	11.479.851.296,00			1.590,00	20.818.655.223,00	53,57	7 53,22	1.590,00	20.818.655.223,00	1.590,00	0,01	Inspektorat Kota	
1.2.02.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,00 Laporan	10.100.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Inspektorat Kota	
															Rata-		n kinerja Kegiatan (%)	76,79	53,21	76,79	20.818.655.223,00	76,79	0,72		
													_				edikat kinerja Kegiatan	Tinggi							
1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	3.842.028.000,00	0,00	149.050.000,00	26,87	530.600.000,00			26,87	679.650.000,00	26,87	7 17,69	26,87	679.650.000,00	26,87	0,02		

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Per samp 202	arget Renstra rangkat Daerah pai dengan tahun 5 (Akhir Periode Renstra PD)	Kir Pera sampa Pera	lisasi Capaian nerja Renstra angkat Daerah ai dengan Renja angkat Daerah un Lalu (n-2)	Angg Perangka Berjalan (. Kinerja dan aran Renja t Daerah Tahun Tahun n-1) yang evaluasi		Realis	asi Kine	erja Pada Triwulan	III	IV	Kinerj Ren Da	lisasi Capaian a dan Anggaran ja Perangkat aerah yang dievaluasi	Ting Capa Kinerj Reali Angga Renja Tahun r	aian a dan sasi aran a PD	Angg Perang Tahu Tahu Ren	asi Kinerja dan garan Renstra gkat Daerah s/d n 2025 (Akhir n Pelaksanaan ja Perangkat h Tahun 2025)	Tingk Capai Kinerja Realis Angga Renst Perang Daerah tahun 2	an dan asi ran gkat s/d	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11	12=	8+9+10+11	13=12/7	x100%		14=6+12	15=14/5>	100%	16	17
'	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	10	17
1.2.05.2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1,00 Paket	381.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.05.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					134,00 Orang	3.460.528.000,00	0,00	149.050.000,00	72,00	530.600.000,00			72,00	679.650.000,00	53,73	19,64	72,00	679.650.000,00	72,00	0,00	Inspektorat Kota	
															Rata-r		kinerja Kegiatan (%)	26,87	17,69	26,87	679.650.000,00	26,87	0,02		
																Pred	likat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	3.087.773.530,00	8,33	0,00	33,33	520.584.662,00			41,67	520,584,662,00	41,67	16,86	41,67	520.584.662,00	41,67	0,02		
1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1,00 Paket	26.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4,00 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	2,00	166.473.862,00			2,00	166.473.862,00	50,00	41,62	2,00	166.473.862,00	2,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2,00 Paket	354.575.530,00	0,00	0,00	1,00	78.240.600,00			1,00	78.240.600,00	50,00	22,07	1,00	78.240.600,00	1,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12,00 Dokumen	55.000.000,00	2,00	0,00	4,00	0,00			6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.06.8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12,00 Laporan	300.000.000,00	2,00	0,00	4,00	55.357.500,00			6,00	55.357.500,00	50,00	18,45	6,00	55.357.500,00	6,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12,00 Laporan	1.951.784.000,00	2,00	0,00	4,00	220.512.700,00			6,00	220.512.700,00	50,00	11,30	6,00	220.512.700,00	6,00	0,00	Inspektorat Kota	
															Rata-r	ata capaian	kinerja Kegiatan (%)	41,67	16,86	41,67	520.584.662,00	41,67	0,02		
																Pred	likat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	981.769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.07.5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					55,00 Unit	411.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.07.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					131,00 Unit	569.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	
		<u> </u>	1	1	l		l	I		1			1		Rata-r	ata capaian	kinerja Kegiatan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																Pred	likat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	449.353.440,00	16,67	69.602.257,00	33,33	97.004.948,00			50,00	166.607.205,00	50,00	37,08	50,00	166.607.205,00	50,00	0,01		

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Per samp 202!	arget Renstra rangkat Daerah pai dengan tahun 5 (Akhir Periode Renstra PD)	Kin Pera sampa Pera	lisasi Capaian perja Renstra angkat Daerah ai dengan Renja angkat Daerah un Lalu (n-2)	Angg Perangka Berjalan (t Kinerja dan garan Renja tt Daerah Tahun (Tahun n-1) yang ievaluasi		Realis	asi Kind	erja Pada Triwulan	III	IV	Kinerj Rer D	lisasi Capaian ja dan Anggaran nja Perangkat aerah yang dievaluasi	Ting Capa Kinerj Reali Angg Renj Tahun	aian a dan isasi aran a PD	Ang Peran Tahu Tahu Rer	asi Kinerja dan garan Renstra gkat Daerah s/d n 2025 (Akhir n Pelaksanaan ja Perangkat h Tahun 2025)	Tingk Capai Kinerja Realis Angga Renst Perang Daerah tahun 2	dan dan dasi ran tra gkat o s/d	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
	_				5		6		7		8		9	10	11	12:	=8+9+10+11	13=12/7	7×100%		14=6+12	15=14/5>			
1	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	K R	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	16	17
1.2.08.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12,00 Laporan	5.600.000,00	2,00	0,00	4,00	0,00			6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12,00 Laporan	443.753.440,00	2,00	69.602.257,00	4,00	97.004.948,00			6,00	166.607.205,00	50,00	37,54	6,00	166.607.205,00	6,00	0,00	Inspektorat Kota	
									•						Rata	rata capaian	kinerja Kegiatan (%)	50,00	37,08	50,00	166.607.205,00	50,00	0,01		
																Pre	dikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	908.327.090,00	0,00	0,00	35,41	120.908.608,00			35,41	120.908.608,00	35,41	13,31	35,41	120.908.608,00	35,41	0,00		
1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7,00 Unit	281.200.000,00	0,00	0,00	4,00	53.275.213,00			4,00	53.275.213,00	57,14	18,95	4,00	53.275.213,00	4,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.09.2		Penyediaan Jasa Pemetiharaan, Biaya Pemetiharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					38,00 Unit	526.288.000,00	0,00	0,00	12,00	67.633.395,00			12,00	67.633.395,00	31,58	12,85	12,00	67.633.395,00	12,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.09.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					200,00 Unit	100.839.090,00	0,00	0,00	35,00	0,00			35,00	0,00	17,50	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	Inspektorat Kota	
															Rata		kinerja Kegiatan (%) dikat kinerja Kegiatan	35,41 Sangat	13,31	35,41	120.908.608,00	35,41	0,00		
																		Rendah		40,04	22.306.405.698,00		0,77		
															Kata		n kinerja Program (%) dikat kinerja Program	40,04 Sangat	46,02	40,04	22,306,405,698,00	40,04	0,77		
6.1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	84,30 Nilai	3.150.000.000,00	87,50 %	464.599.000,00	84,30 Nilai	2.043.637.000,00	0,00	0,00	21,17	65.488.000,00			21,17	65.488.000,00	Rendah 17,84	3,20	21,17	65.488.000,00	21,17	2,08		
2.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Indikator Tindak Lanjut Temuan Eksternal Indikator Tindak Lanjut Temuan Internal					100 %	1.414.415.000,00	0,00	0,00	22,22	30.988.000,00			22,22	30.988.000,00	22,22	2,19	22,22	30.988.000,00	22,22	0,98		
2.2.01.1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					1,00 Laporan	129.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Anggaran dan Kegiatan di Triwulan 3
2.2.01.2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					5,00 Laporan	617.518.000,00	0,00	0,00	0,00	19.788.000,00			0,00	19.788.000,00	0,00	3,20	0,00	19.788.000,00	0,00	0,01	Inspektorat Kota	- Terdapat Pengurangan Anggaran - Belum ada Kebutuhan atas Belanja Tenaga Ahli
2.2.01.3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					8,00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	- Terdapat Pengurangan Anggaran - Belum ada Kebutuhan atas Belanja Narasumber

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Per samp 202!	arget Renstra rangkat Daerah pai dengan tahun 5 (Akhir Periode Renstra PD)	Kin Pera sampa Pera	lisasi Capaian erja Renstra Ingkat Daerah Ii dengan Renja Ingkat Daerah un Lalu (n-2)	Angg Perangka Berjalan (: Kinerja dan Jaran Renja t Daerah Tahun Tahun n-1) yang Jevaluasi		Realis I	asi Kine	erja Pada Triwulan	III	IV	Kiner Re	alisasi Capaian rja dan Anggaran nja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Ting Capa Kinerj Reali Angga Renja Tahun r	ian a dan sasi aran a PD	Angg Perang Tahu Tahu Ren	asi Kinerja dan garan Renstra gkat Daerah s/d n 2025 (Akhir n Pelaksanaan ja Perangkat h Tahun 2025)	Tingk Capai Kinerja Realis Angga Rens Peran Daerak tahun 2	dan dan dasi ran tra gkat o s/d	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11	12	2=8+9+10+11	13=12/7	×100%		14=6+12	15=14/5	c100%	16	17
		,	,	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	KR	р К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	10	.,
1.2.08.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12,00 Laporan	5.600.000,00	2,00	0,00	4,00	0,00			6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12,00 Laporan	443.753.440,00	2,00	69.602.257,00	4,00	97.004.948,00			6,00	166.607.205,00	50,00	37,54	6,00	166.607.205,00	6,00	0,00	Inspektorat Kota	
															Rata	-rata capaia	n kinerja Kegiatan (%)	50,00	37,08	50,00	166,607,205,00	50,00	0,01		
																Pro	edikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100 %	908.327.090,00	0,00	0,00	35,41	120.908.608,00			35,41	120.908.608,00	35,41	13,31	35,41	120.908.608,00	35,41	0,00		
1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					7,00 Unit	281.200.000,00	0,00	0,00	4,00	53.275.213,00			4,00	53.275.213,00	57,14	18,95	4,00	53.275.213,00	4,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.09.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					38,00 Unit	526.288.000,00	0,00	0,00	12,00	67.633.395,00			12,00	67.633.395,00	31,58	12,85	12,00	67.633.395,00	12,00	0,00	Inspektorat Kota	
1.2.09.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					200,00 Unit	100.839.090,00	0,00	0,00	35,00	0,00			35,00	0,00	17,50	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	Inspektorat Kota	
															Rata	-rata capaia	n kinerja Kegiatan (%)	35,41	13,31	35,41	120.908.608,00	35,41	0,00		
																Pro	edikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
															Rati		an kinerja Program (%)	40,04	46,02	40,04	22.306.405.698,00	40,04	0,77		
																Pr	edikat kinerja Program	Sangat Rendah							
6.1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	84,30 Nilai	3.150.000.000,00	87,50 %	464.599.000,00	84,30 Nilai	2.043.637.000,00	0,00	0,00	21,17	65.488.000,00			21,17	65.488.000,00	17,84	3,20	21,17	65.488.000,00	21,17	2,08		
2.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Indikator Tindak Lanjut Temuan Eksternal Indikator Tindak Lanjut Temuan Internal					100 %	1.414.415.000,00	0,00	0,00	22,22	30.988.000,00			22,22	30.988.000,00	22,22	2,19	22,22	30.988.000,00	22,22	0,98		
2.2.01.1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					1,00 Laporan	129.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Anggaran dan Kegiatan di Triwulan 3
2.2.01.2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					5,00 Laporan	617.518.000,00	0,00	0,00	0,00	19.788.000,00			0,00	19.788.000,00	0,00	3,20	0,00	19.788.000,00	0,00	0,01	Inspektorat Kota	- Terdapat Pengurangan Anggaran - Belum ada Kebutuhan atas Belanja Tenaga Ahli
2.2.01.3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					8,00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	- Terdapat Pengurangan Anggaran - Belum ada Kebutuhan atas Belanja Narasumber

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Per samp 202	arget Renstra rangkat Daerah pai dengan tahun 5 (Akhir Periode Renstra PD)	Kir Pera sampa Pera	ilisasi Capaian nerja Renstra angkat Daerah ai dengan Renja angkat Daerah run Lalu (n-2)	Angg Perangkat Berjalan (: Kinerja dan aran Renja t Daerah Tahun Tahun n-1) yang evaluasi		Realis I	sasi Kir	erja Pada Triwulan	III	IV	Kiner Rer D	ilisasi Capaian ja dan Anggaran nja Perangkat iaerah yang dievaluasi	Ting Capa Kinerja Reali Angga Renja Tahun r	aian a dan sasi aran a PD	Angg Perang Tahu Tahu Ren	asi Kinerja dan Jaran Renstra Jarah s/d n 2025 (Akhir n Jarahsanaan ja Perangkat n Tahun 2025)	Tingk Capai Kinerja Realis Anggai Renst Perang Daerah tahun 2	an dan asi ran tra gkat n s/d	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			,		5		6		7		8		9	10	11	12	=8+9+10+11	13=12/7	×100%		14=6+12	15=14/5×	c100%		
1	2	3	4	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	K Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	16	17
2.2.01.4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					44,00 Laporan	198.045.000,00	0,00	0,00	44,00	11.200.000,00			44,00	11,200.000,00	100,00	5,66	44,00	11.200.000,00	44,00	0,00	Inspektorat Kota	- Sebagian belanja masih datam proses pencairan - Alokasi anggaran dipergunakan untuk kegiatan Reviu LK Semester 1 Tahun 2025 yang baru dilaksanakan pada Trivulan 3 (bulan Juli) dan akhir tahun dalam rangka persiapan penyusunan LKPD
2.2.01.6		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk					1,00 Kesepakatan	256.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Adanya Perubahan Uraian pada Pada Parsial 3
2.2.01.7		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					3,00 Dokumen	13.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00			1,00	0,00	33,33	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Anggaran di Triwulan 3
															Rata-		n kinerja Kegiatan (%)	22,22	2,19	22,22	30.988.000,00	22,22	0,98		
																Pre	dikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
			Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	39,00 %				39,00 %																	
2.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel Persentase Tindaklanjut Temuan Internal Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal					100 %	629.222.000,00	0,00	0,00	18,00	34,500.000,00			18,00	34.500.000,00	18,00	5,48	18,00	34.500.000,00	18,00	1,10		
2.2.02.1		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani					1,00 Laporan	153.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Terdapat Pengurangan Anggaran
2.2.02.2		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					25,00 Laporan	475.672.000,00	0,00	0,00	9,00	34.500.000,00			9,00	34.500.000,00	36,00	7,25	9,00	34.500.000,00	9,00	0,01	Inspektorat Kota	
														-	Rata-		n kinerja Kegiatan (%)	18,00	5,48	18,00	34,500.000,00	18,00	1,10		
																Pre	dikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
															Rata-		n kinerja Program (%)	21,17	3,20	21,17	65.488.000,00	21,17	2,08		
																Pre	edikat kinerja Program	Sangat Rendah							

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Per samp 202!	arget Renstra rangkat Daerah oai dengan tahun 5 (Akhir Periode Renstra PD)	Kin Pera sampa Pera	lisasi Capaian Perja Renstra Ingkat Daerah Bai dengan Renja Ingkat Daerah Un Lalu (n-2)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realis	sasi Kinerja Pada Triwulan				Ki	Realisasi Capaian nerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n-1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			4	5		6		7		8		9		10	11	+	12=8+9+10+11		13=12/7×100%		14=6+12		(%) 15=14/5×100%		
1	2	3		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	+		(Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	16	17
6.1.3	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01	5,00 OPD	3.000.000.000,00	75,00 %	352.465.663,00	5,00 OPD	2.620.542.930,00	0,00	0,00	0,00	7.460.000,00				7.460.000,00	0,00	0,28	0,00	7.460.000,00	0,00	0,25		
3.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3,1					100 %	1.108.982.930,00	0,00	0,00	0,00	7.460.000,00				7.460.000,00	0,00	0,67	0,00	7.460,000,00	0,00	0,25		
3.2.01.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun					2,00 Rekomendasi	393.568.000,00	0,00	0,00	0,00	7.460.000,00				7.460.000,00	0,00	1,90	0,00	7.460.000,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Pekerjaan dan Anggaran di Triwulan 3 Untuk Penyerapan Anggaran Baru Honorarium Narasumber
3.2.01.2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun					6,00 Rekomendasi	715.414.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Pekerjaan dan Anggaran di Triwulan 3
				U		'		•	•			ı	•		Rat	a-rata ca	paian kinerja Kegiatan (%)	0,00	0,67	0,00	7.460.000,00	0,00	0,25		
Predikat kinerja Kegiatan														Sangat Rendah											
			Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas	1,00 OPD				1,00 OPD																	
3.2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP BB keatas Level Kapabilitas AKIP Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Maturitas SPIP minimal 3,01					100 %	1.511.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.02.1		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					6,00 perangkat	227.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Anggaran dan Pekerjaan Ada di Triwulan 3 dan 4
3.2.02.2		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					44,00 perangkat	121.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Sedang Berjalan Pekerjaan - Manajemen Risiko - SPIP - Zona Integritas (ZI) - PK-APIP
3.2.02.3		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					7,00 Kegiatan	1.001.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Kegiatan dan Anggaran di Triwulan 4
3.2.02.4		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					44,00 perangkat	160.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inspektorat Kota	Alokasi Kegiatan dan Anggaran di Triwulan 4
<u> </u>								I	1	I		l			Rat	a-rata ca	paian kinerja Kegiatan (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ko	nde.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan	Indikator Kinerja Program (outcome)/	Per	arget Renstra rangkat Daerah pai dengan tahun	Kin Pera	isasi Capaian erja Renstra ngkat Daerah	Angg	: Kinerja dan Jaran Renja t Daerah Tahun		Reali	sasi Kin	erja Pada Triwuli	an			Kinerja	isasi Capaian a dan Anggaran ja Perangkat	Ting Cap Kiner Real	aian ja dan	Ang Peran	sasi Kinerja dan garan Renstra gkat Daerah s/d un 2025 (Akhir	Tingl Capai Kinerja Realis Angga	ian a dan sasi aran	Unit Perangkat Daerah	Keterangan
	de	RKPD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	2025	5 (Akhir Periode Renstra PD)	Pera	ii dengan Renja ngkat Daerah un Lalu (n-2)	Berjalan (Tahun n-1) yang evaluasi		1		II	Ш	IN	,	Da	erah yang lievaluasi	Angg Renj	aran	Tahu Rer	in Pelaksanaan nja Perangkat ah Tahun 2025)	Rensi Perang Daerah tahun 2 (%)	gkat h s/d 2025	Penanggung Jawab	Receiungun
			,			5		6		7		8		9		1		12=	8+9+10+11	13=12/7	7×100%		14=6+12	15=14/5×100%		16	47
	1	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K R	к	Rp	К	K Rp		Rp	К	Rp	К	Rp	16	17
		-																Predi	ikat kinerja Kegiatan	Sangat Rendah							
																Ra	ita-rata	a capaian	kinerja Program (%)	0,00	0,28	0,00	7.460.000,00	0,00	0,25		
																		Pred	ikat kinerja Program	Sangat Rendah							
														RATA -RATA CAPAIAN	N KINERJA	DAN ANG	GARAN	N DARI SEL	URUH PROGRAM (%)	27,81	42,11	27,81	22.379.353.698,00				
																PREDIKA	T KINER	RJA DARI	SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah							

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,RPJP dan RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Inspektorat Kota Bekasi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Kebijakan perubahan Rencana Kerja diperkuat dengan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda-AP4EP tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kota Bekasi 3.1.1 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan. Inspektrat Daerah Kota Bekasi mendukung Visi Kota Bekasi "Kota Bekasi semakin Nyaman dan Sejahtera", misi Kelima mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren. Misi Kelima ini mempunyai Tujuan Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota.

Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota bidang Pengawasan dengan indikator sasaran yaitu "Level Kapabilitas APIP dan Nilai IEPK",

Inspektorat juga mempunyai tugas dalam penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penataan Peraturan Perundang undangan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Pelayanan Publik.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 7 yaitu "Tingkat Penguatan Pengawasan", terdiri dari :

- 1) Implementasi Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP;
- 3) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
- 4) Menyusun identifikasi risiko;
- 5) Laporan LHKPN/LHKASN;
- 6) Manajemen Anti Suap;
- 7) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- 8) Penaganan dan pengaduan whistleblowing system;
- 9) Penanganan benturan kepentingan.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah Kota Bekasi pasca dilantiknya Kepala Daerah Kota Bekasi masa bhakti 2025-2029.

3.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Untuk mencapai tujuan maka *Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran* yaitu : Meningkatkan efektifitas Pengawasan Intern dan Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2025 (Sesuai RPJMD dan Renstra)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota	3	SPIP terintegrasi Pemerintah Kota Bekasi	2.8
	Mendorong Budaya Intergtiras dan Pencegahan Korupsi	Meningkatkan efektivitas Pengawasan Intern	Level Kapabilitas APIP	3
		Meningaktkan Efektivitas Pencegahan Korupsi	Niali IEPK	2,96

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak lepas dari RPJMD Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor:000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.Ap4ep Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Koτa Bekasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Program, Sasaran, Indikator, Target , Realisasi 2025 (sesuai RPJMD dan Renstra Inspektorat 2025)

Program Inspektorat	Sasaran Program Inspektorat	Indikator Sasaran Program Inspektorat	Target tahun 2025	Realisasi tahun 2025	Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan perundangan Undangan	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	74,50	63.87	Semester I
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	86.55	87.3	Semester I
Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Meningkatkan Efektivitas Pencegahan	Indeks Manajemen Risiko	2,78	-	

Dan Asistensi	Nilai MCSP KPK	90,50	-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan	100	100	
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	95	67,34	
	IP ASN	86,8	87.77	
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100		

Sampai dengan semester I 2025

Tabel 3.3
RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 INSPEKTORAT KOTA BEKASI

											TAR	GET	ANGG/	RAN	
		KOE	DE F	REKE	NIN	G		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR SETELAH Perubahan	SEBELUM Perubahan	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETERLAH PERUBAHAN	SELISIH
1				Τ	Τ	Τ	Τ	2	3		4	5	6	7	8
4	2	1	1		Γ	Τ	Τ	BELANJA INSPEKTORAT					59.263.370.000	54.040.384.586	- 5.222.985.414,00
4	2	1	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100			
									Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%	95			
									Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daga	IP ASN	100%	86,8		50 671 402 506	******
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100	50.803.368.060	50.671.402.586	- 131.965.474,00
									Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%			
									Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%			
4	2	1	1	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK Kinerja	100%	100%	225.885.000	102.351,000	- 123.534.000,00
4	2	1	1	1				Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinera SKPD	13 Laporan	13 Laporan	225.885.000	102.351.000	- 123.534.000,00

			ı	ı	ı	ı	ı	II anoran Canaian Kineria dan	Hkhticar Realicaci Kineria SKPN dan	LKinera SKPD	I	1 1	I	I	
4	2	1	1	1	2	2		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK Kinerja	100%	100%	39.128.506.000	41.256.514.000	2.128.008.000,00
4	2	1	1	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	113 Orang/bulan	39.118.406.000	41.246.414.000	2.128.008.000,00
4	2	1	1	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	10.100.000	10.100.000	•
4	2		1	1	2	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat	Meningkatnya pelayanan Adminisrasi Perangkat Daerah	100%	100%	3.851.910.000	3.018.546.026 -	833.363.974,00
4	2	1	1	1	2	5	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	1Paket	381.500.000	381.500.000	-
4	2	1	1	1	2	5	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	120 Orang	3.470.410.000	2.637.046.026 -	833.363.974,00
4	2	1	1	1	2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkaatnya pelayanan Umum perangkat Daerah	100%	100%	3,568,183,530	3,355,383,030 -	212.800.500,00
4	2	1	1	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	1Paket	26.414.000	11.949.000 -	14.465.000,00
4	2	1	1	1	2	6	2	Penyediaan logistik Kantor		Jurnlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	400.000.000	400.000.000	-
4	2	1	1	1	2	6	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	354.575.530	380.369.030	25.793.500,00
4	2	1	1	1	2	6	4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1Dokumen	1 Dokumen	55.000.000	55.000.000	-
4	2	1	1	1	2	6	8	Fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1Laporan	1 Laporan	300.000.000	300.000.000	•
4	2	1	1	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 Laporan	100 Laporan	2.432.194.000	2.208.065.000 -	224.129.000,00

4	2	1	1	1	2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhi kebutuhan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	100%	100%	2.671.203.000	1.619.278.000 -	1.051.925.000,00
4	2	1	1	1	2	7	5	Pengadaan mebel	Daerah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	411.821.000	620.979.000	209.158.000,00
4	2	1	1	1	2	7	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	2.259.382.000	998.299.000 -	1.261.083.000,00
4	2	1	1	1	2	8		Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya jasa pelayanan umum perangkat Daerah Pemerintahana Daerah	100%	100%	449,353,440	285,553,440 -	163.800.000,00
4	2	1	1	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.600.000	5.600.000	
4	2	1	1	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	0	0	0	-
4	2	1	1	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	443.753.440	279.953.440 -	163.800.000,00
4	2	1	1	1	2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dan peralatan yang terpelihara dengan baik	100	297 unit	908.327.090	1.033.777.090	125,450,000,00
4	2	1	1	1	2	9	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibauarkan Paiaknua	7 Unit	7 Unit	281.200.000	361.650.000	80.450.000,00
4	2	1	1	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	51 Unit	526.288.000	571.288.000	45.000.000,00
4	2	1	1	1	2	9	6	pemeliharaan Peralatan dan Mesin Iainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	239 Unit	100.839.090	100,839,090	-

							D.							
4	2		1	2			PROGRAM	Prsenatase Tindak Lanjut Temuan	Prsenatase Tindak Lanjut Temuan	80%	00.55			
•	-	1	'	-			PENYELENGGARAAN PENGAVASAN	Internal	Internal	80%	86.55			
								Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	Prsenatase Tindak Lanjut Temuan Ekternal	91%	74.50	3.699.122.000	1.907.429.000	1.791.693.000,00
								Persentase Perangkat Daerah dengan penatausahaan keuangan yang akuntabel	0	100%				
4	2	1	1 :	2	2	1	Pengelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Reviu dan Pengawasan	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan/pengasawan yang ditindak lanjuti	6 dokumen	6 dokumen	2.819.700.000	1.278.207.000 -	1.541.493.000,00
4	2	1	1	2	2	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	4 Laporan	129.852.000	129.852.000	-
4	2	1	1 :	2	2	1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1Laporan	4 Laporan	1.434.908.000	617.518.000 -	817.390.000,00
4	2	1	1	2	2	1	3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	8 Laporan	200.000.000	200.000.000	-
4	2	1	1	2	2		4 Reviu Laporan Keuangan	Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	44 OPD	358.740.000	198.045.000 -	160.695.000,00
4	2	1	1	2	2	1	6 Kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1Kesepakatan	1Kesepakatan	325,000,000	119.792.000 -	205.208.000,00
4	2	1	1	2	2	1	7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK F dan Tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring I dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan APIP	1Dokumen	2 Dokumen	371.200.000	13.000.000 -	358.200.000,00
4	2	1	1	2	2	2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujua Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan	Jumlah laporan kerugian yang diselesaikan	2 Dokumen	7 Dokumen	879.422.000	629,222,000 -	250,200,000,00
4	2	1	1	2	2	2	Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1 Laporan	2 Laporan	160.000.000	153,550,000 -	6.450.000,00
4	2	1	1	2	2	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	5 Laporan	719.422.000	475.672.000 -	243.750.000,00

4	2	1	1	3				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3.01 Level Kapabilitas APIP	Indeks Manajemen Risiko Nilai MCSP KPK	36,5 Level 3	2.800 90.50		1.461.553.000	- 3.299,326,940,00
									Persentase PD dengan nilai AKIP BB keatas		100%				
4	2	1	1	3	2	1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Produk Kebijakan Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang dihasilkan	2 Produk Kebijakan Pengawasan	2 Produk Kebijakan Pengawasan	1.663.589.940	363.148.000	- 1,300,441,940,00
4	2	1	1	3	2	1	1	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bdiang Pengawasan Yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1Rekomendasi	1Rekomendasi	847.350.00 0	35.748.000	- 811.602.000,00
4	2	1	1	3	2	1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	816.239.940	327.400.000	- 488.839.940,00
4	2	1	1	3	2	2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	4 Dokumen	4 Dokumen	3.097.290.000	1.098.405.000	- 1,998,885,000,00
		1	1	3	2	2	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan PD		6PD	501.022.000	207.944.000	- 293.078.000,00
4	2	1	1	3	2	2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifiaksi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 Perangkat Daerah	44 PD	317.492.000	121.464.000	- 196.028.000,00
4	2	1	1	3	2	2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan	2 Kegiatan	2 keg	1.972.166.000	608.275.000	- 1.363.891.000,00
4	2	1	1	3	2	2	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 Perangkat Daerah	1 keg	306,610,000	160.722.000	- 145.888,000,00

BAB IV PENUTUP

Renja perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor:000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.Ap4ep Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Triwulan II (semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target dan anggaran setelah direviu adalah merupakan hasil dari peoses penyesuaian dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025.

Untuk perhitungan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan standarisasi harga barang dan jasa yang ada di SIPD RI yang sudah di update oleh Instansi yang berwenang di Pemerintah Kota Bekasi, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi prioritas pembangunan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat tahun 2025 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan pagu indikatif sebagai konsekuensi dari Instruksi Presdien Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 000.7.2.4/136325/BAPPELITBANGDA.AP4EP tentang Rasionalisasi Belanja Daerah pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025. Semula Rp. 59.263.370.000 menjadi 54.040.284.586 (-5.222.985.414): Efiseinsi dan Rasionalisasi.

Demikian renja perubahan ini disajikan untuk dijadikan sebagai pedoman kerja dan sekaligus talok ukur peningkatan kinerja aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kota Bekasi.

INSPEKTOR DAERAH

Bekasi, 20 Agustus 2025 Inspektur Kota Bekasi

lis Wisynuwati, S.Sos.,CRA.,CRP.,CGCAE,QGIA